

## Bobby Pangkas Anggaran Bencana Sumut .....

Dari Halaman 1

Medan, dikutip dari InfraSumut.Com, Rabu (10/12).

Elfenda Ananda menjelaskan, total belanja daerah pada APBD Sumut sebesar Rp13,3 triliun. Di dalamnya terdapat belanja tidak terduga, yang secara regulasi diperuntukkan pada bantuan bencana alam, sebesar Rp123,5 miliar.

Adapun APBD Sumut 2025, tertuang dalam lembaran daerah Peraturan Gubernur Sumut Nomor 37 Tahun 2024.

Selanjutnya, muncul Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang akhirnya terjadi pergeseran anggaran sebanyak dua kali, di mana Agus Fatoni sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai Pj Gubernur Sumut, merubah Perregub 37/2024.

## NasDem: Kurang 'Aware' Terhadap Bencana .....

Dari Halaman 1

terhadap pengalokasian anggaran bencana, artinya kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri," kata Ujang, dicatat dari inilah.com, Rabu (10/12/2025).

Ia menjelaskan, bila dalam setiap pembahasan anggaran, dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini, kepala daerah,

Dengan perubahan itu, belanja daerah yang semula sebesar Rp13,1 triliun, berkurang sebesar Rp138,8 miliar, yang adalah konsekuensi dari berkurangnya penerimaan dari dana transfer.

Namun untuk pos belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp843,1 miliar atau naik signifikan sebesar Rp719,6 miliar (583%). Selanjutnya Bobby Nasution yang dilantik sebagai Gubernur Sumut pada akhir Februari 2025, melakukan pergeseran anggaran hingga empat kali.

Akhirnya dalam Perubahan APBD 2025, belanja daerah menjadi sebesar Rp12,5 triliun. Sedangkan untuk belanja tidak terduga, dialokasikan sebesar Rp98,3 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp minus 744,8 miliar, atau tumbuh (minus) 88% dibanding masa Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni.

Sehingga, kata Elfenda, dapat disimpulkan belanja tidak terduga atau belanja untuk bencana alam besarnya hanya 0,8% dari total belanja daerah.

"Sungguh ironis pada bulan November 2025 terjadi bencana banjir yang melanda Sumatera Utara," ujar Elfenda.

Sebab, sebelumnya Gubernur Sumut Bobby Nasution mengungkapkan bahwa total kerugian Sumut akibat bencana alam banjir dan tanah longsor mencapai Rp9,98 triliun.

Lalu pada tahun 2026, ujar Elfenda menambahkan, anggaran penanganan bencana lebih sedikit lagi, atau hanya sebesar Rp70 miliar.

"Pertanyaannya, apakah tahun 2026 dijamin tidak ada bencana di Sumut? Dalam prespektif inilah, perlu langkah antisipasi, sehingga harus dipersiapkan anggaran belanja tak terduga," pungkasnya. (IMC/js)

## Efisiensi Anggaran .....

Dari Halaman 1

cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.

"Silahkan dilihat dari R-APBD 2025, kalau dibilang di awal angkanya Rp800 miliar (lebih), bukanya dari R-APBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD itu angkanya Rp123 miliar," ucapnya.

Ia pun menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang dijalankan pada tahun 2025 ini yang juga berpengaruh pada anggaran tersebut.

"Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025, kan kita ada efisiensi. Kita disuruh efisiensi, kita efesiensikan. Nah pertanyaannya efisiensi uangnya ditaruh dimana, kan gak mungkin gak kita cantumkan," ujar Bobby.

Kemudian dikatakan Bobby, anggaran yang efisiensi dipindahkan ke Belanja Tak Terduga (BTT) yang juga digunakan untuk pembayaran bonus Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) tahun 2024 lalu.

"Dilewatkan uangnya di BTT, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, BTT yang dianggar-

kan dari awal itu sudah digunakan untuk PON, pembayaran atlet yang saat itu tidak semua dialokasikan, baik bonus atlet PON maupun Peparnas," tuturnya.

Kemudian ada juga BTT yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur di Nias Barat, yang sebelumnya juga tidak dialokasikan di APBD.

"Lalu untuk Nias Barat, yang jembatannya terputus itu menggunakan BTT juga, karena tidak dianggarkan sebelumnya, jadi Rp800 miliar itu kalau mau dilihat dari R-APBD silahkan buka, berapa angkanya itu saya rasa," katanya. (bes/js)

## 969 Orang Tewas, Aceh Terbanyak .....

Dari Halaman 1

jadi 969 jiwa dengan ditemukannya tambahan dua korban di Langkat, Sumatra Utara, dan tiga korban di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube BNPB, Rabu (10/12).

Muhari menyebut untuk korban hilang per hari ini sebanyak 252 jiwa. Jumlah ini berkurang dari data sebelumnya 264 jiwa pada Selasa (9/12).

"Kemudian untuk korban hilang, pada hari ini berkurang 12 orang," ujarnya.

Muhari menyebut Aceh menjadi daerah dengan jumlah korban tewas terbanyak mencapai 391 jiwa.

Dengan rincian korban meninggal per Provinsi, Aceh 391 jiwa. Tertinggi di Aceh Utara 128 jiwa, lalu disusul Aceh Tamiang 58 jiwa dan Aceh Timur 48 jiwa. Kemudian 31 jiwa masih hilang dan 4.300 jiwa terluka.

Banjir dan longsor juga merusak rumah hingga fasilitas umum. Data lapangan mencatat 138.500 rumah, 668 fasilitas umum, 210 rumah ibadah, 153 fasilitas kesehatan, 261 gedung, 305 fasilitas pendidikan, dan 313 jembatan rusak.

Sementara korban meninggal di Sumut 340 jiwa. Tertinggi di Tapanuli Tengah dengan 110 jiwa, diikuti Tapanuli Selatan 85 jiwa, dan Kota Sibolga 53 jiwa.

Kemudian 128 jiwa masih hilang dan 651 orang terluka.

Sedangkan korban meninggal dunia di Sumbar mencapai 238 jiwa. Tertinggi di Kabupaten Agam dengan 181 jiwa. Lalu 93 jiwa masih hilang dan 113 jiwa terluka.

Banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada akhir November lalu. Terdapat 52 kabupaten/kota terdampak bencana ekologis ini.



## LIPPSU Desak Kejati Sumut Tetapkan .....

Dari Halaman 1

diduga kuat sebagai inisiatif utama proyek yang merugikan keuangan negara ini. Indikasi keterlibatan terlilih dari pemaksaan memasukan anggaran Smart Board ke APBD Perubahan 2024," ujar Azhari di Medan, Rabu (10/12).

Sikap LIPPSU ini adalah respons atas aksi keempat Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) di depan kantor Kejati Sumut, baru-baru ini.

PERMAK menilai, penanganan perkara berjalan timpang: pejabat di level dinas sudah ditahan, namun pejabat yang diduga memiliki peran strategis belum tersentuh hukum.

Tuntutan utama PERMAK:

- Menetapkan F.H, M.H, dan A.H.L sebagai tersangka.

- Mengangkap para pejabat tersebut, karena diduga ikut merancang dan memerintahkan distribusi pengadaan Smart Board di tiga wilayah.

- Mengambil alih seluruh proses penyidikan dari Kejari Langkat dan Kejari Tebing Tinggi.

- PERMAK menegaskan, stagnasi kasus di tingkat bawah dapat menghilangkan jejak aliran

anggaran atau potensi state capture oleh pejabat daerah.

Rangkaian Peran

Dari APBD Perubahan hingga Distribusi Proyek Investigasi internal LIPPSU menemukan dugaan bahwa keputusan pengadaan Smart Board tidak hanya diproses di tingkat dinas, tetapi turut melibatkan kepala daerah yang mendorong percepatan anggaran.

Faisal Hasrimy – Pj Bupati Langkat (Saat Itu) sebagai pengarah utama pengadaan Smart Board di tiga wilayah:

Langkat, Disdik Tebing Tinggi, dan Disdik Sumut.

Di Langkat, proyek Smart Board senilai Rp 50 miliar dipadukan dengan pengadaan mebel senilai Rp 50 miliar yang sampai saat ini pengadaan mebel tersebut tidak selesai, total Rp 100 miliar.

LIPPSU menyebutkan, terdapat kejanggalan dalam proses memasukan anggaran ke APBD-P 2024. Muttaqien Hasrimy – Pj Wali Kota Tebing Tinggi – saat itu ikut menyertui dan memfasilitasi percepatan proyek serupa di wilayahnya. PERMAK menilai proses pengadaan terindikasi tidak sesuai kebutuhan riil

sekolah.

Sementara, Abdul Haris Lubis (semasa menjabat Kadis Pendidikan Sumut), dianggap memiliki peran teknis dan administratif, termasuk pengaturan paket proyek lintas kabupaten/ kota.

**Mangkir**

Salah satu sorotan terbesar PERMAK adalah ketidakhadiran Faisal Hasrimy dalam dua kali panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Langkat.

Azhari menyebutkan, sikap ini mengindikasikan adanya ketidaklegasan penegakan hukum.

"Jika pejabat lain sudah ditahan, tetapi aktor utama tidak hadir dua kali panggilan, ini menjadi sinyal buruk. Karena itu, Kejati harus mengambil alih," tegasnya.

Menurut LIPPSU, Kejati Sumut memiliki dasar hukum untuk mengambil alih penyidikan apabila terjadi hambatan penanganan di Kejari, tersangka mangkir panggilan, atau ada potensi intervensi kekuasaan di daerah.

LIPPSU dan PERMAK sepakat bahwa penyelesaian kasus ini akan menjadi tolok ukur keseriusan aparat hukum dalam penegakan hukum korupsi di sektor pendidikan. (A-10)

## Saat Para Perusak Hutan Bersembunyi di Balik Rompi .....

Dari Halaman 1

ya dilakukan. Penghentian sementara itu ibarat mengejut maling setelah rumah sudah tinggal pondasi. Kita tidak butuh teguran. Kita butuh pengadilan. Kita butuh ganti rugi. Kita butuh keadilan yang tidak bisa dibayar dengan konferensi pers.

Rumah warga hancur, desa tenggelam, sawah hilang, ladang rusak, ternak hanyut, tubuh terluka, jiwa terguncang, nyawa melayang. Semua itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan paket sembako atau kunjungan pejabat yang datang untuk berfoto. Perusahaan-perusahaan itu harus membayar. Tidak boleh ada satupun yang lolos. Karena ketika hutan dirusak, Allah tidak tinggal diam. Setiap dosa sosial akan kembali dalam bentuk bencana yang mengetuk pintu kita semua tanpa kecuali.

Dan hari ini kita sedang merasakan akibat dari tangan-tangan yang rakus itu. Sayangnya, mereka yang merusak justru bersembunyi di balik legalitas dan perizinan yang kabur. Mereka sembunyi di balik pejabat yang mendatangkan kertas demi kertas, seolah tinta itu tidak akan ditanya di akhirat nanti.

Para lawyer mestinya tidak hanya menjadi penonton. Ini saatnya berdiri paling depan. Menggugat perusahaan-perusahaan itu melalui jalur perdata, class action, bahkan pidana. Karena bencana yang menelan nyawa bukan kecelakaan, itu kelalaian yang berubah menjadi kejahatan. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri dengan formulir pengaduan yang panjang dan prosedur yang membingungkan. Keadilan tidak boleh hanya milik mereka yang mampu membayar advokat mahal.

Dan para pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, jangan merasa aman. Jangan merasa tanda tangan di balik meja bisa dilupakan begitu saja. Izin yang kalian keluarikan itu yang menjadi pembuka jalan bagi bencana ini. Kalian ikut bertanggung jawab atas setiap desa yang hilang dan setiap anak yang menangis kehilangan rumah. Jabatan bukan benteng dari pertanggungjawaban. Di dunia mungkin bisa lolos, di akhirat tidak ada pasal yang bisa dinegosiasikan.

Sesungguhnya kita hanya menuntut satu hal, yaitu kembalikan apa yang telah kalian ambil. Kembalikan hutan yang kalian habisi. Kembalikan mata pencarian yang kalian remukkan.

Kembalikan kedaulatan warga yang tenggelam bersama banjir. Karena banjir ini bukan hanya tentang air yang naik. Ia adalah cermin besar tentang siapa yang tamak dan siapa yang menganggap akibatnya.

Jika mereka si para perusak hutan masih tidak melihat dirinya sebagai sumber bencana, mungkin bukan karena cerminkannya yang buram, tapi karena mereka terlalu sibuk menghitung keuntungan.

Maka, negara seyogyanya tidak boleh membiarkan mereka berlepas tangan. Tidak boleh ada ruang bagi para pemilik modal untuk berlindung di balik lobinya hukum atau perizinan yang kabur. Perusahaan yang mengeruk keuntungan dari hutan harus mengembalikan apa yang telah diambilnya dari masyarakat. Jika mereka menolak, maka pintu pengadilan pidana harus dibuka.

Sekali lagi catat. Banjir ini bukan air biasa yang turun dari langit. Ia membawa pesan keras bahwa alam yang rusak selalu menang hutangnya. Dan hutang itu tidak boleh dibayar dengan air mata korban. Ia harus dibayar oleh mereka yang telah mengambil terlalu banyak dari hutan yang kini tinggal nama.

## KPK OTT Bupati .....

Dari Halaman 1

lanjutan.

Rencananya mereka akan tiba di Kantor KPK pada Rabu malam.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak dimaksud.

Sebelum ini, KPK sudah lebih dulu membongkar kasus dugaan korupsi lewat OTT dengan menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco dkk dan Gubernur Riau Abdul Wahid dkk.(cnni/js)



## Jumlah Pengungsi .....

Dari Halaman 1

"Ada penurunan, ini sebuah kemajuan," kata dia saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data yang dimiliki Osmar, tercatat ada 1.047.107 warga korban banjir dan tanah longsor yang mengungsi di beberapa posko dan tenda pengungsian pada Senin (8/12).

Osmar menilai hal tersebut pertanda bahwa beberapa korban perlakuan mulai pindah ke kediaman masing-masing

dan kembali beraktivitas.

Osmar mengatakan, seluruh personel masih akan dikerahkan untuk mengantar logistik, membuka jalur darat hingga memaksimalkan proses evakuasi di lokasi bencana.

Osmar juga memastikan seluruh pesawat angkut, helikopter TNI hingga kapal perang akan terus dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Sebelumnya, korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Sumatra mencapai 969 orang.

Data itu dikutip Dashboard Penanganan Bencana Darurat Ban